

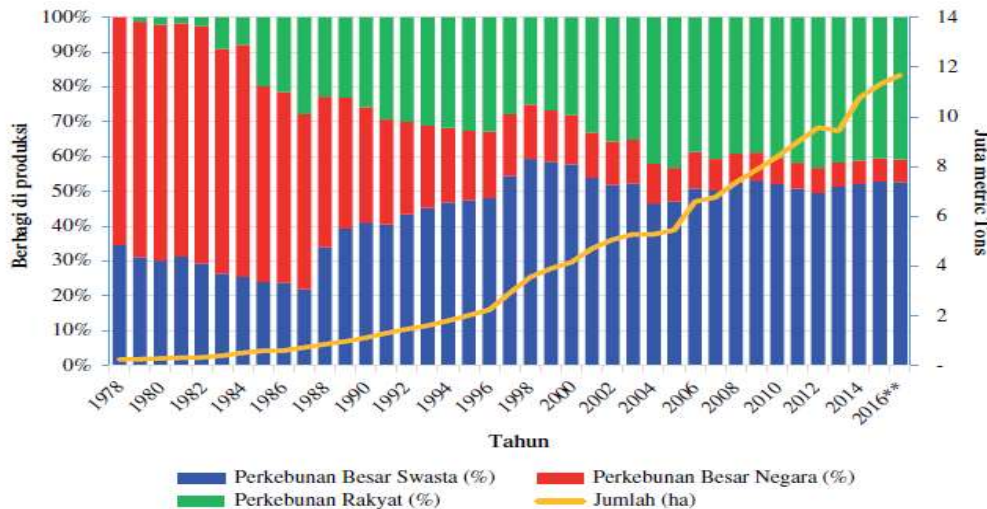


RANTAI PASOK KELAPA SAWIT

4 MEI 2020

PERKEMBANGAN PERKEBUNAN SAWIT DI INDONESIA

Gambar 1. Perkembangan Perkebunan Sawit di Indonesia



Gambar 1. Perbandingan wilayah tanam sawit, berdasarkan jenis aktor 1978–2016.

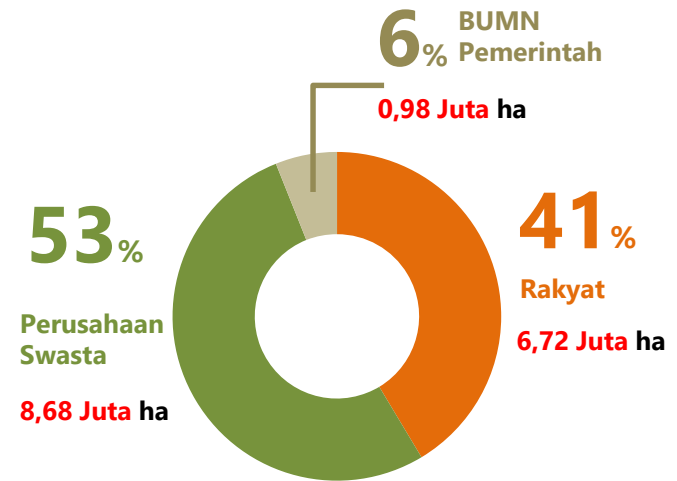
** Data 2016 adalah data estimasi

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2015)

Sumber : Mewujudkan petani kecil sawit mandiri yang lebih produktif dan berkelanjutan di Indonesia, Idsert Jelsma, Cifor, 2016

- Sampai akhir tahun 1970-an, luas perkebunan kelapa sawit masih 260 ribu ha dan didominasi oleh **PERKEBUNAN NEGARA**. Sebelum ditetapkannya PIR **tidak tercatat adanya PERKEBUNAN RAKYAT**, tetapi saat ini, luas **PERKEBUNAN RAKYAT** sudah mencapai **6,72 juta ha**.
- Berdasarkan hasil rekonsiliasi data tutupan lahan tahun 2018/2019, luasan lahan sawit mencapai 16,38 juta ha dengan proyeksi komposisi **PERKEBUNAN SWASTA 8,68 juta ha (53%)**, **PERKEBUNAN RAKYAT 6,72 juta ha (41%)**, sedangkan **PERKEBUNAN NEGARA hanya tinggal 0,98 juta ha (6%)**.

Gambar 2. Proyeksi Komposisi Kepemilikan Kebun Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Tutupan Lahan Sawit Tahun 2018/2019



Total Luas Sawit : 16,38 Juta ha

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020



PERKEBUNAN SAWIT DAN TANAMAN PERKEBUNAN LAINNYA

Dari 5 komoditas tanaman perkebunan dengan total lahan terbesar, hanya kelapa sawit yang memiliki persentase perkebunan swasta >50%. Meskipun lahan perkebunan didominasi oleh perkebunan rakyat, namun rata-rata kepemilikannya cenderung sangat kecil.

Tabel 1. Rata-rata Kepemilikan Lahan Pekebun

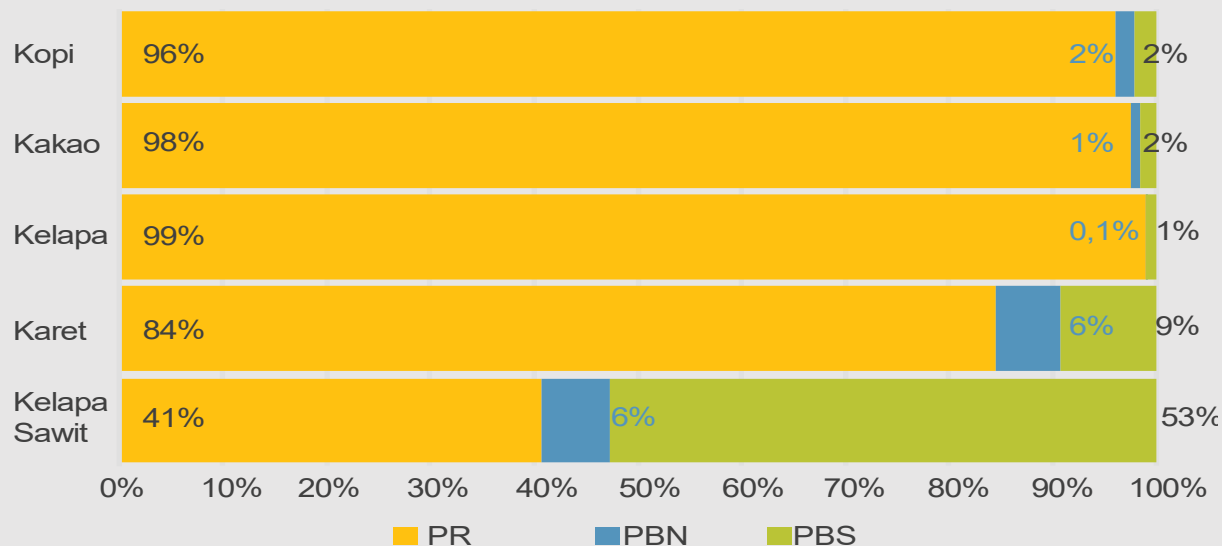
Komoditas	Luas Perkebunan	Persentase Kepemilikan			Rata-rata Kepemilikan Lahan Petani
	2016	PR	PBN	PBS	
Kelapa Sawit	11.672.861	41%	6%	53%	2,2 Ha/kapita
Karet	3.639.695	84%	6%	9%	2,1 Ha/kapita
Kelapa	3.544.022	99%	0%	1%	1,2 Ha/kapita
Kakao	1.722.314	98%	1%	2%	1,2 Ha/kapita
Kopi	1.233.293	96%	2%	2%	0,8 Ha/kapita

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN SAWIT BERSIFAT INKLUSIF

- Jika dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya (misal karet dan kopi), hanya kelapa sawit yang komposisi kepemilikan perkebunan besar (swasta dan negara) dan perkebunan rakyat berimbang. **Hal ini menunjukkan pembangunan perkebunan kelapa sawit bersifat INKLUSIF.**

Gambar 3. Profil Penguasaan Lahan 5 Komoditas dengan Lahan Terbesar



Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016

**KOMPOSISI KEPEMILIKAN KEBUN SAWIT 53% SWASTA dan 41% RAKYAT
MENCIPTAKAN MOMENTUM LEPAS LANDAS BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI
SEKTOR PERKEBUNAN DAN PEREKONOMIAN INDONESIA.**

Benjamin Higgins, dalam salah satu hasil temuan penelitiannya di Indonesia menulis :
“Setiap negara memiliki suatu momen tepat untuk memulai perkembangan, suatu masa ketika faktor-faktor sosiologi, politik, dan ekonomi bersinergi menyediakan iklim yang luar biasa baik bagi **LEPAS LANDAS** ke pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam bentuknya yang sederhana, **LEPAS LANDAS** itu paling mungkin terjadi apabila golongan pengusaha lokal tumbuh bersama dengan golongan politik yang memiliki kekuasaan dan kemauan dalam menyediakan kerangka kebijakan yang cocok untuk memanfaatkan bakat kewirausahaan.



KEBIJAKAN YANG DIUPAYAKAN PEMERINTAH

Dibutuhkan upaya baik dari sisi KEBIJAKAN dan PERAN SERTA SWASTA DAN RAKYAT itu sendiri untuk menciptakan momentum lepas landas.

Apa yang dapat dilakukan PIHAK SWASTA DAN RAKYAT?

Dibutuhkan peningkatan keterlibatan swasta, khususnya untuk **meningkatkan produktivitas** perkebunan rakyat sehingga dalam peningkatan produksi yang dilakukan bukan ekstensifikasi melainkan intensifikasi.



1

Perusahaan Swasta memberikan pendampingan kepada pekebun rakyat khususnya dalam hal *good agriculture practices (GAP)*. GAP akan meningkatkan produktivitas sehingga tidak perlu ada pembukaan lahan baru.

2

Lebih aktif menjadi avalis, quality control dan off-taker dari produk perkebunan rakyat.

3

Perkebunan Rakyat menerapkan GAP dan berupaya memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

Apa yang dilakukan Pemerintah?

Kunci utami yang dapat dilakukan oleh PEMERINTAH terletak pada formulasi skema praktik keterlibatan pihak swasta pada perkebunan melalui regulasi yang dibentuk.



1

Meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat melalui program **Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)**.

2

Melibatkan swasta dalam **Peremajaan Sawit Rakyat** melalui skema kemitraan.

3

Percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan penyelesaian legalitas lahan perkebunan rakyat.

4

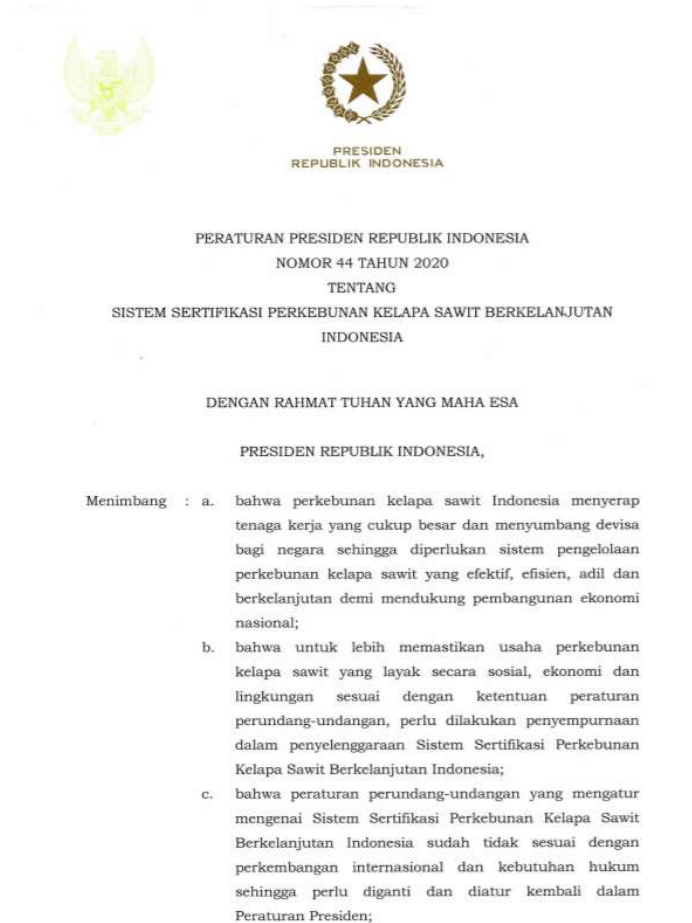
Penyediaan akses pembiayaan kepada pekebun misalnya dengan KUR.

5

Percepatan pelaksanaan ISPO bagi seluruh perkebunan sawit di Indonesia.



ISPO SEBAGAI INSTRUMEN KEBERTELUKURAN RANTAI PASOK



Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi ISPO antara lain untuk:

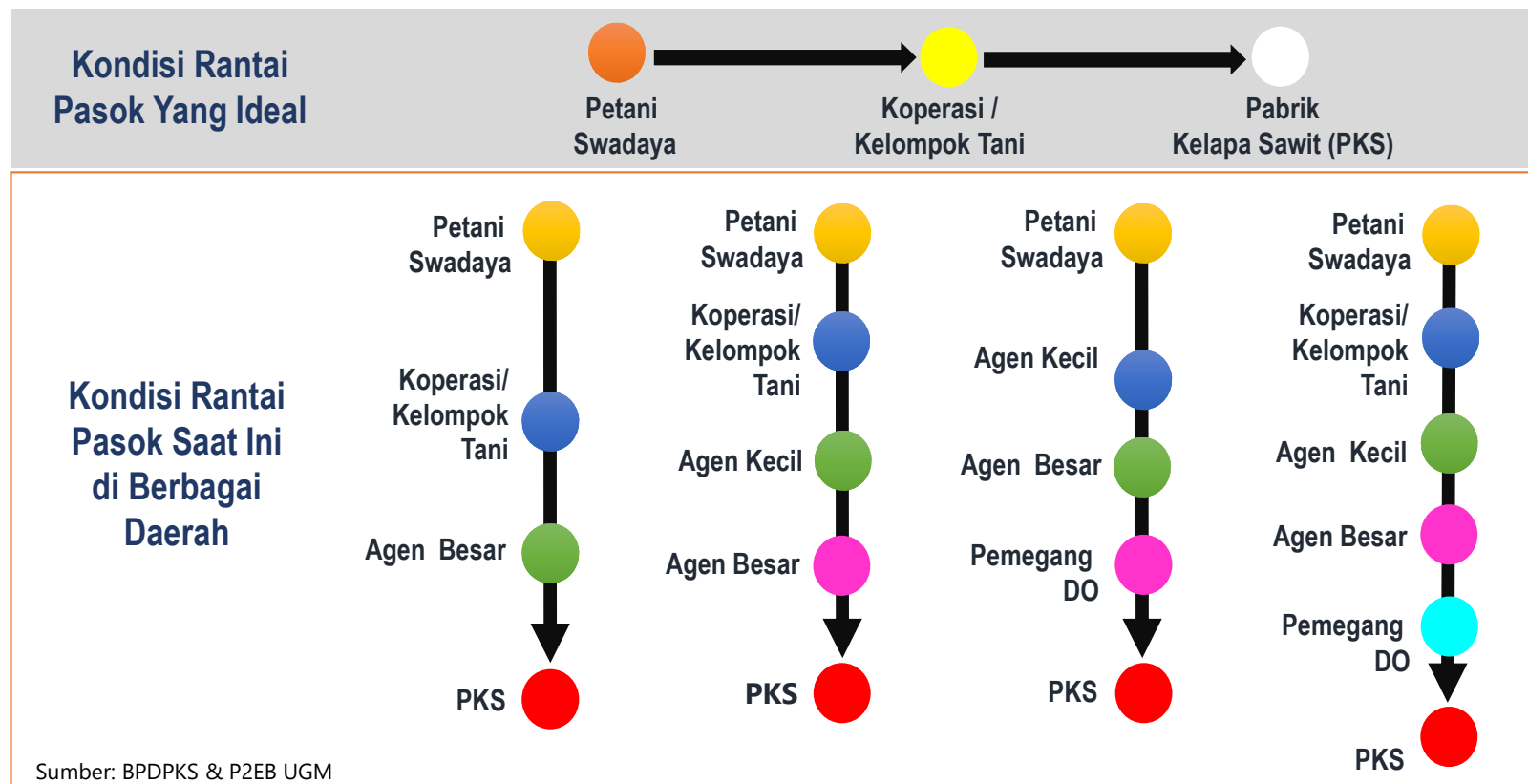
- 1 memperbaiki tata kelola Sertifikasi ISPO dengan membuka ruang partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.
- 2 menata ulang kelembagaan Komisi ISPO dari sisi keanggotaan, tugas, fungsi, dan integritas.
- 3 meletakkan fungsi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam sistem Sertifikasi ISPO.
- 4 menyempurnakan standar dan persyaratan sertifikasi ISPO.
- 5 meningkatkan perhatian terhadap persoalan deforestasi, konversi lahan gambut, dan emisi gas rumah kaca,
- 6 membangun mekanisme pemantauan independen yang lebih kredibel.

Dalam Perpres ISPO ini, memuat prinsip keberteluran (*traceability*).



RANTAI PASOK TBS DARI PETANI KE PABRIK KELAPA SAWIT

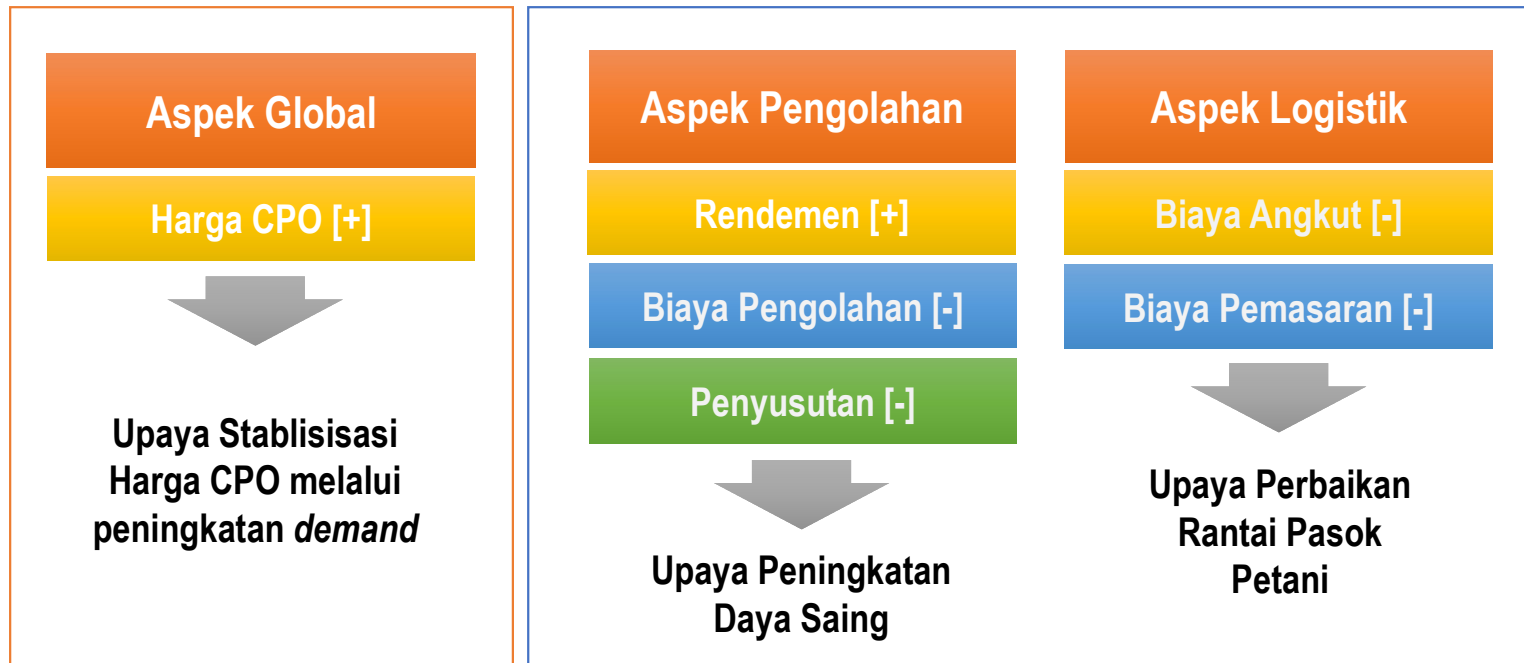
Kondisi rantai pasok TBS dari Petani ke PKS bervariasi. Panjangnya rantai pasok TBS mengurangi keuntungan petani swadaya. Upaya perbaikan rantai pasok perlu dilakukan.



ASPEK RANTAI PASOK KELAPA SAWIT

Selain ditentukan oleh harga CPO, faktor lain yang menentukan harga TBS juga ditentukan oleh aspek pengolahan pada tingkat petani serta aspek logistik untuk pemasaran dan angkutan.

Peningkatan daya saing pada tingkatan pengolahan dan perbaikan rantai pasok sangat diperlukan untuk memperbaiki harga TBS pada tingkat petani.



Sumber: BDPKS & P2EB UGM



DUKUNGAN PERBAIKAN RANTAI PASOK KELAPA SAWIT

- 1 Upaya memperbaiki harga TBS di tingkat petani, selain dilakukan melalui upaya peningkatan demand CPO, diperlukan dukungan perbaikan rantai pasok dan peningkatan daya saing di tingkat petani.
- 2 Hal ini disebabkan karena selain harga CPO, harga TBS juga ditentukan oleh kemampuan Pabrik Kelapa Sawit dalam melakukan pengolahan TBS menjadi CPO, serta biaya transportasi dan panjangnya rantai pasok serta pemasaran.
- 3 Rantai pasok TBS dari petani swadaya ke Pabrik Kelapa Sawit umumnya cukup panjang yang melibatkan setidaknya Koperasi/Kelompok Tani, Agen Besar, Agen Kecil dan Pemegang DO.
- 4 Panjangnya rantai pasok TBS ini mengurangi keuntungan petani karena setiap titik pasok turut mengambil keuntungan dari penjualan TBS.
- 5 Salah satu program penyaluran dana BPDPKS untuk memperbaiki kesejahteraan petani adalah melalui dukungan perbaikan rantai pasok dan peningkatan daya saing.





TERIMA KASIH



Lampiran

